

Penelitian ini mengkaji peran konselor Rekso Dyah Utami (RDU) dalam memenuhi rasa aman perempuan korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjelaskan mengapa peran tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh klien jika dianalisis melalui perspektif keamanan manusia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memadukan wawancara mendalam dengan konselor dan klien untuk memahami kesenjangan antara mandat perlindungan institusional dan pengalaman subjektif korban dalam proses pendampingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan formal, tetapi oleh sejauh mana layanan tersebut mampu mewujudkan *freedom from fear*, *freedom from want*, dan *freedom to live in dignity*. Dalam dimensi *freedom from fear*, praktik konseling yang memuat narasi moral, agama, atau normalisasi kekerasan berpotensi melahirkan reviktimisasi simbolik dan mereduksi rasa aman korban. Pada dimensi *freedom from want*, keterbatasan dukungan ekonomi dan lemahnya pemantauan pasca pendampingan memperpanjang kerentanan korban. Sementara itu, pada dimensi *freedom to live in dignity*, relasi kuasa yang timpang dalam ruang pendampingan menghambat pengakuan atas agensi dan martabat korban. Penelitian ini berkontribusi pada studi perdamaian dan resolusi konflik dengan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk konflik struktural, sehingga penanganannya harus dipahami sebagai bagian integral dari agenda *peacebuilding* yang berorientasi pada keamanan manusia secara holistik.

Kata Kunci: Keamanan Manusia; Konselor; Kekerasan Terhadap Perempuan; Perdamaian dan Resolusi Konflik; RDU

ABSTRACT

This study examines the role of counselors at Rekso Dyah Utami (RDU) in ensuring the sense of security of women survivors of violence in the Special Region of Yogyakarta and explains why this role is not fully experienced as protective by clients when analyzed through a human security perspective. Using a qualitative approach, the study draws on in-depth interviews with counselors and survivors to explore the gap between institutional protection mandates and survivors' lived experiences during the counseling process. The findings demonstrate that effective assistance is not merely defined by the availability of formal services, but by the extent to which these services realize freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity. In the freedom from fear dimension, counseling practices that incorporate moral, religious, or violence-normalizing narratives contribute to secondary victimization and undermine survivors' sense of safety. In terms of freedom from want, limited economic support and weak post-assistance monitoring prolong survivors' structural vulnerability. Meanwhile, within the freedom to live in dignity dimension, unequal power relations in counseling spaces hinder the recognition of survivors' agency and dignity. This study contributes to peace and conflict resolution scholarship by emphasizing that gender-based violence constitutes a form of structural conflict, and therefore must be addressed as an integral part of peacebuilding efforts grounded in a holistic human security framework.

Keywords: Human Security; Counselors; Violence Against Women; Peace and Conflict Resolution; RDU